



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029



DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN  
TAHUN 2025



BUPATI KAUR  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KAUR TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah Menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029, perlu Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



BUPATI KAUR  
PROVINSI BENGKULU

-2-

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



BUPATI KAUR  
PROVINSI BENGKULU

-3-

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



BUPATI KAUR  
PROVINSI BENGKULU

-4-

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (ditulis Lengkap dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



BUPATI KAUR  
PROVINSI BENGKULU

-5-

24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 279);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 306);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaur Tahun 2021 -2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 279);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 306);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR  
TAHUN 2025-2029

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Bupati adalah Bupati Kaur.



BUPATI KAUR  
PROVINSI BENGKULU

-6-

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
12. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan focus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
13. Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.



BUPATI KAUR  
PROVINSI BENGKULU

-7-

14. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
15. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
16. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.
17. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
18. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa dating.
20. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil dan dampak)
21. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
22. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
23. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.



BUPATI KAUR  
PROVINSI BENGKULU

-8-

24. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

BAB II  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2025 - 2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
- (2) Rencana Strategis Perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memperhatikan :

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Rencana Strategis Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome);



BUPATI KAUR  
PROVINSI BENGKULU

-9-

- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan Nasional;
- f. Regulasi yang berlaku; dan
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN

BAB V PENUTUP.

- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.



BUPATI KAUR  
PROVINSI BENGKULU  
-10-

BAB III  
PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 6 November 2025  
BUPATI KAUR,



Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 7 November 2025

PJ SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,



HIFTHARIO SYAHPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2025 NOMOR : 1450



BUPATI KAUR  
PROVINSI BENGKULU  
-11-

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR 65 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KAUR TAHUN 2025-2029

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KAUR TAHUN 2025-2029

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur
3. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kaur
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur
6. Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur
8. Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
10. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur
11. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur
14. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur
15. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur
16. Dinas Sosial Kabupaten Kaur
17. Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Kaur
18. Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PP dan PA Kabupaten Kaur
19. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur
20. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur
21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur
23. Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur
24. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur
25. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur
26. Dinas Penanaman Modal dan PSTP Kabupaten Kaur
27. Dinas Perpustakaan Kabupaten Kaur



BUPATI KAUR  
PROVINSI BENGKULU

-12-

28. Dinas Perikanan Kabupaten Kaur
29. Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur
30. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur
31. Dinas Pertanian Kabupaten Kaur
32. Kecamatan Muara Sahung
33. Kecamatan Lungkang Kule
34. Kecamatan Maje
35. Kecamatan Padang Guci Hulu
36. Kecamatan Kaur Selatan
37. Kecamatan Padang Guci Hilir
38. Kecamatan Kaur Utara
39. Kecamatan Luas
40. Kecamatan Tanjung Kemuning
41. Kecamatan Semidang Gumay
42. Kecamatan Kaur Tengah
43. Kecamatan Nasal
44. Kecamatan Kelam Tengah
45. Kecamatan Tetap
46. Kecamatan Kinal

BUPATI KAUR,



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Anugrah dan RahmatNya, sehingga Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dengan baik.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kaur ini menjabarkan RPJMD Kabupaten Kaur tahun 2025- 2030 seiring dengan selesainya Periode RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025 – 2029. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, perubahan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

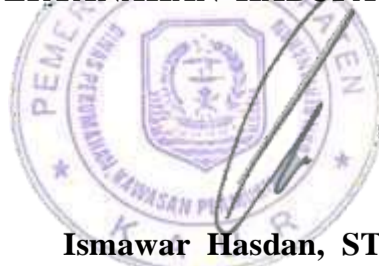
Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kaur ini diharapkan mampu meningkatkan keterpaduan, keteraturan dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai kinerja yang sebaik-baiknya. Akhirnya dokumen ini dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan guna mencapai visi dan misi melalui Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 tentunya masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan guna terakomodirnya Renstra ini sangat diharapkan untuk kesempurnaannya.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra).

Bintuhan, 30 Oktober 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN KAUR**



**Ismawar Hasdan, ST., M.Si.**  
Pembina TK.I, IV/b  
NIP. 19790816 200312 1 005

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>8</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.1.4 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan .....	18
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	19
2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.2.2 Isu Strategi.....	21
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>22</b>
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	22
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	22
3.3 Teknik Merumuskan tujuan dan sasaran Renstra.....	23
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra .....	25
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>26</b>
4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .....	26
4.2 Indikator Kinerja Daerah.....	30
4.3. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	31
4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung program Prioritas	74
4.5 Indikator Kinerja Utama .....	76
4.6 Indikator indikator kinerja Kunci .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.2.1 Data Administrasi Personil Menurut Golongan.....	14
Tabel 2.1.2.2 Data Administrasi Personil Menurut Pendidikan.....	14
Tabel 2.1.2.3 Data Administrasi Personil Menurut Jabatan .....	14
Tabel 2.1.2.4 Data Sarana dan Prasarana.....	15
Tabel 2.1.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
Tabel 2.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	17
Tabel 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan.....	19
Tabel 2.2.2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD .....	21
Tabel 3.3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD .....	24
Tabel 3.4.1 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai Tujuan Renstra.....	25
Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Daerah .....	30
Tabel 4.3.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .....	31
Tabel 4.4.1 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	74
Tabel 4.5.1 Indikator Kinerja Utama PD .....	76
Tabel 4.5.2 Indikator Kinerja Kunci PD .....	76

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1.1.1 Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kaur.....	13
Gambar 2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan .....	18

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip otonomi daerah, perencanaan pembangunan menjadi instrumen utama untuk menerjemahkan kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Amanat ini tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa pembangunan nasional merupakan satu kesatuan yang dilaksanakan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di tingkat daerah, ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan, yang saling terkait dan mendukung pencapaian pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam kerangka tersebut, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menjadi keharusan normatif dan sekaligus kebutuhan substantif. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknokratik, tetapi juga menjadi alat kendali dan arah kebijakan sektoral masing-masing Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan untuk lima tahun ke depan. Dengan melakukan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029, serta memperhatikan prioritas nasional dan provinsi, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menjadi landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel dan berorientasi hasil.

Kabupaten Kaur sebagai salah satu wilayah pesisir di Provinsi Bengkulu memiliki karakteristik geografis, demografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang khas. Wilayah ini menyimpan potensi besar di sektor pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta industri kecil dan menengah. Namun demikian, potensi ini masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan teknologi, maupun persoalan klasik seperti kesenjangan wilayah, kemiskinan, dan keterbatasan fiskal daerah. Periode perencanaan 2025–2029 merupakan momentum penting bagi Kabupaten Kaur untuk melakukan akselerasi pembangunan dengan memperkuat struktur ekonomi lokal, memperluas pemerataan pelayanan dasar, dan meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks inilah, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan diharapkan mampu menjadi jawaban terhadap berbagai tantangan pembangunan yang multidimensional tersebut, sekaligus menjadi pedoman strategis dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang lebih terarah, adaptif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan juga bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan antara kebijakan sektoral Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kaur terpilih periode 2024–2029, yaitu: —*Menuju Kabupaten Kaur yang Maju, Sejahtera dan Bahagia*|| Visi ini memiliki makna mendalam yang merefleksikan tiga dimensi utama pembangunan daerah, yaitu:

- Kaur yang Maju: mencerminkan dorongan untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur daerah secara merata dan berkelanjutan. Kemajuan yang dimaksud juga melibatkan transformasi kelembagaan pemerintahan, penguatan tata kelola birokrasi, dan peningkatan daya saing daerah.
- Kaur yang Sejahtera: ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan yang adil dan merata. Kesejahteraan didefinisikan secara multidimensi, mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, ekonomi yang inklusif, serta perlindungan sosial yang menyeluruh.
- Kaur yang Bahagia: menggambarkan kondisi ideal masyarakat yang hidup harmonis, sejahtera, aman, dan tenteram, baik secara lahir maupun batin. Pemerintah hadir sebagai fasilitator yang responsif terhadap kebutuhan warga dan memastikan bahwa pembangunan membawa dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Misi-misi pembangunan yang diturunkan dari visi tersebut menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun sasaran, strategi, dan program prioritas yang saling bersinergi. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tidak hanya menjadi aktivitas rutin lima tahunan, tetapi merupakan bagian dari upaya kolektif seluruh unsur pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi besar Kabupaten Kaur.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan daerah melalui perencanaan program dan kegiatan. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan disusun untuk memberikan arah yang jelas mengenai fungsi dan

peran masing-masing perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Setiap Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, serta indikator kinerja utama yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan adanya Renstra yang menjadi alat pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, Renstra juga menjadi dasar dalam alokasi anggaran melalui mekanisme penganggaran berbasis kinerja, serta memperkuat akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kaur dilakukan berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan *top-down-bottom-up*. Pendekatan teknokratik menjamin bahwa dokumen disusun berdasarkan data dan analisis yang objektif. Pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti DPRD, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil. Pendekatan politis dilakukan dengan mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah sebagai hasil dari proses demokratis. Sedangkan pendekatan *top-down-bottom-up* dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan dan prioritas pembangunan dari tingkat nasional, provinsi, hingga desa. Secara umum, tahapan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan meliputi:

- Tahap persiapan dan penyusunan kerangka kerja;
- Penyusunan rancangan awal Renstra berdasarkan analisis kondisi dan isu strategis;
- Konsultasi publik dan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- Penyusunan rancangan akhir berdasarkan masukan stakeholders;
- Penetapan dan legalisasi dokumen Renstra.

Seluruh proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas, serta berorientasi pada hasil dan dampak pembangunan jangka menengah. Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tidak dapat dilepaskan dari upaya refleksi dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan strategis sebelumnya. Secara umum, pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kaur selama periode sebelumnya (2021–2025) telah menorehkan sejumlah capaian penting. Dari evaluasi tersebut, jelas bahwa Renstra periode 2025–2029 perlu dirancang sebagai perbaikan menyeluruh, baik dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pengendalian pembangunan.

Seiring dengan berkembangnya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), arah kebijakan pembangunan saat ini menekankan

pentingnya hasil (outcome) dan dampak (impact) dibanding sekadar input dan output. Hal ini tercermin dalam pendekatan perencanaan yang menekankan keterpaduan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam konteks Kabupaten Kaur, pendekatan pembangunan yang outcome-based berarti bahwa keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan bukan semata-mata diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan atau serapan anggaran, tetapi lebih pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Setiap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam mendukung arah kebijakan ini. Karena itu, penting bagi setiap Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan untuk mencerminkan keterkaitan antar sektor dan menyusun indikator kinerja yang terintegrasi dengan target pembangunan daerah. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kaur 2025–2029 adalah peta jalan (roadmap) bagi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara lebih terarah, terukur, dan kolaboratif.

Dokumen ini tidak hanya menjawab tuntutan normatif dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat dan menghadirkan perubahan yang nyata. Dengan menyelaraskan visi misi kepala daerah, kebutuhan masyarakat, tantangan pembangunan, dan dinamika eksternal, maka Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan cita-cita bersama: menjadikan Kabupaten Kaur sebagai daerah yang maju dalam pembangunan, sejahtera dalam pemerataan, dan bahagia dalam kehidupan masyarakatnya. Penyusunan Renstra ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang lebih proaktif, inovatif, dan bertanggung jawab. Karena sejatinya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi oleh sejauh mana komitmen, kolaborasi, dan kepekaan seluruh aparatur dan pemangku kepentingan terhadap perubahan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Republik Indonsia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Instruksi menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2025-2029
5. Surat Edaran Bupati Kaur Nomor: 000.7.2/1//2025 Tentang Pedoman Dan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

## **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan daerah Kabupaten Kaur di bidang Pelayanan kepada Masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

### **1.3.1 Maksud**

Pembuatan dokumen renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tahun 2025-2029 di tetapkan dengan maksud:

1. Mengarahkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas, fungsi, program dan kegiatan selama 5 tahun kedepan
2. Menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan)

3. Menyelaraskan program kegiatan dengan kebutuhan Masyarakat
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

### 1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen renstra antara lain:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang
2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program dan kegiatan yang realistis dan sesuai dengan kewenangan masing-masing
3. Menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja secara optimal untuk hasil yang maksimal
5. Merespon kebutuhan, aspirasi masyarakat dan menjadi dasar pelayanan public yang lebih baik
6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

Sistematika Renstra PD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat:
  - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;

- b. Sumber daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
  - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan
  - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:
- a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - b. Isu strategis.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat:

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025- 2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU**  
**STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

**2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

**1. Tugas**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan dengan Tipelogi B. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan.

**2. Fungsi**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
2. Pelaksanaan teknis kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
3. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**3. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri atas:

1. Sekretariat terdiri atas:
  - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan

- c. kelompok jabatan fungsional.
2. Bidang Perumahan;
3. Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
4. Bidang Pertanahan;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Sekretariat** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, anggaran dan belanja, pengukuran capaian kinerja serta laporan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sekretariat;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- h. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi;
- c. pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
- d. penyusunan rencana kebutuhan, pengoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas;
- e. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan dan Perundang-Undangan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- g. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur dinas;
- h. pelaksanaan penyusunan analisi jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan dinas;
- i. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- k. pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informatika dan publikasi serta hubungan masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, dan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- c. penyusunan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- d. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan;
- e. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

- g. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah-tanganan barang milik negara;
- h. pengoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

**Bidang Perumahan** mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan system pembiayaan rumah umum;
- b. Pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- c. Pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersial.
- d. Pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan rumah swadaya;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
- f. Pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bidang Perumahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

**Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)** mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum dan perencanaan teknik, penyusunan standard dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum memiliki fungsi:

- a. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman dan PSU;
- b. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

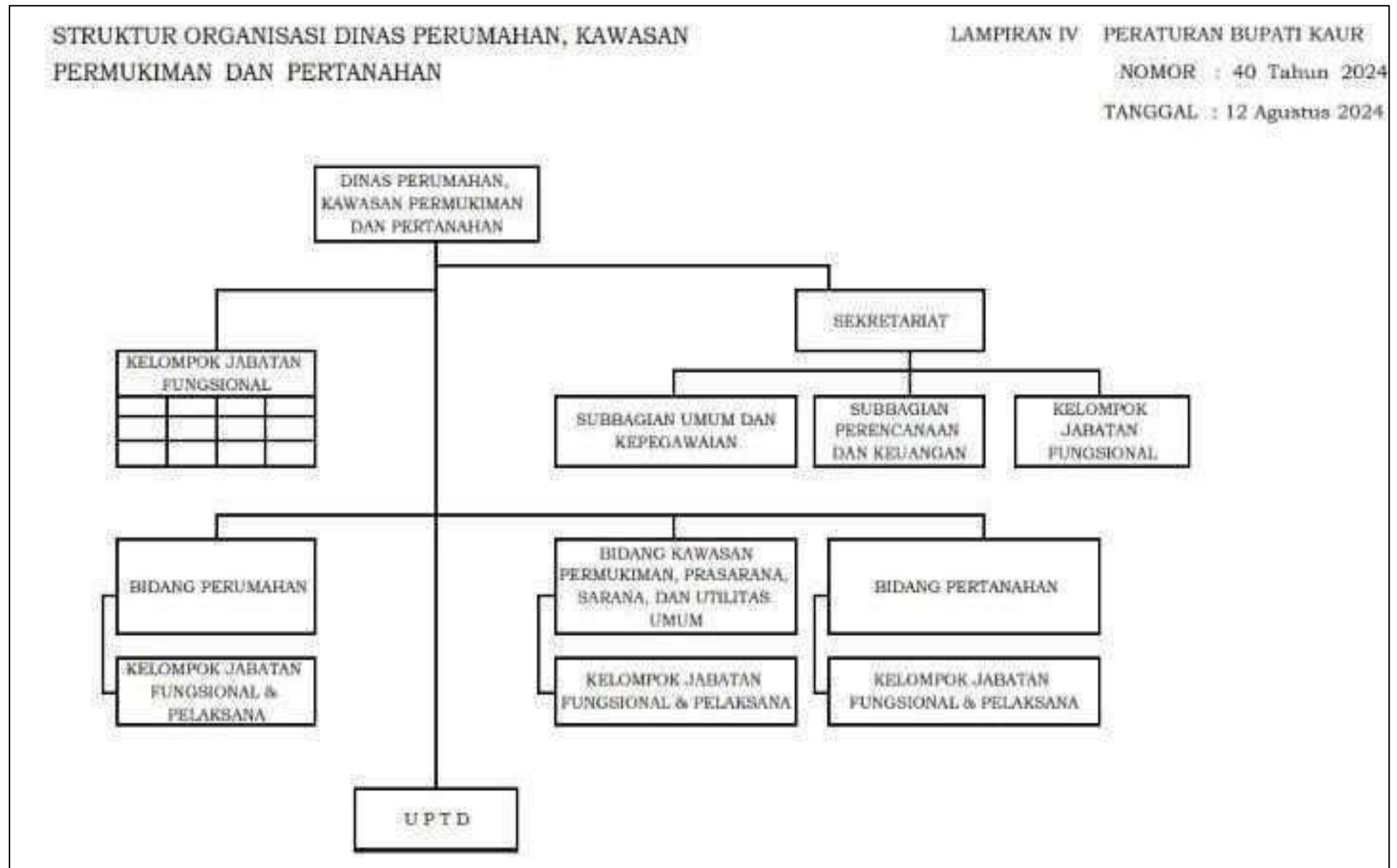
- c. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan PSU;
- d. Penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman.

Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

**Bidang Pertanahan** mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, pengkajian, pengendalian, pengawasan dan penyusunan laporan di Bidang Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pertanahan memiliki fungsi:

- a. Pemberian izin lokasi dalam daerah kabupaten, penerbitan izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;
- b. Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten; dan
- c. Penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah Garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta Ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam daerah kabupaten.

Bidang Pertanahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur

Sumber : PERBUP SOTK nomor 100 tahun 2024

## 2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

- Data Personil

**Tabel 2.1.2.1 Data Administrasi Personil Menurut Golongan**

Uraian	Satuan	Jumlah
1. Golongan I	Orang	-
2. Golongan II	Orang	1
3. Golongan III	Orang	11
4. Golongan IV	Orang	8
5. PPPK	Orang	9
6. PPPK Paruh Waktu	Orang	4
<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>33</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperkimtan, 2025

**Tabel 2.1.2.2 Data Administrasi Personil Menurut Pendidikan**

Uraian	Satuan	Jumlah
1. SMA	Orang	8
2. D3	Orang	-
3. S1	Orang	21
4. S2	Orang	4
<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>33</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperkimtan, 2025

**Tabel 2.1.2.3 Data Administrasi Personil Menurut Jabatan**

Uraian	Satuan	Jumlah
1. Eselon II	Orang	1
2. Eselon III	Orang	4
3. Eselon IV	Orang	1
4. Staf	Orang	27
<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	<b>33</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperkimtan, 2025

- Sarana dan Prasarana

Selain Aspek SDM, Sarana Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur. Adapun Sarana Prasarana yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1.2.4 Data Sarana dan Prasarana**

Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
Mobil Dinas Jabatan	Unit	1	
Mobil Dinas Operasional	unit	0	
Gedung	unit	1	
Laptop	unit	6	
Printer	unit	3	
Komputer	unit	2	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperkimtan, 2025

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur

Berdasarkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur baru terbentuk pada tahun 2016. Adapun tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai RENSTRA tahun 2019-2023 dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	Meningkatkan jumlah rumah layak huni	0.35 %			9-8 %	7%	7%	20 %	0 %	22%	20,69%	0,86%	1,64%			1,45%	12,33%	8,2%
2	Persentase Luas Lingkungan Permukiman Kumuh		0,51%			14-11%	10%	10%	4-2 %	4-2 %	3,7%	3,6%	96,43%	0,04%			0,36%	9,64%	1,33%

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Disperkimtan, 2025

**Tabel 2.1.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur**

Uraian	Anggaran Pada tahun ke- (juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-(%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.237.050.860	4.033.060.754	3.536.785.746	2.962.737.924	3.312.433.125	3.152.042.916	3.850.055.730	3.507.974.608	2.797.043.172	1.572.258.700	97	95	99	94	47	-1	-18
Program Pengembangan Perumahan	21.047.200	666.270.000	6.203.227.900	2.494.131.300	26.500.000	20.915.200	652.753.000	1.084.227.300	223.735.299	12.642.000	99	98	17	1	48	3812	2984
Program Kawasan Permukiman	1.153.190.800		961.297.750	887.610.000	272.950.000	1.113.937.100	2.193.733.692	946.630.810	476.792.706	150.692.000	97	97	98	54	55	13	27
Program Peningkatan Prasarana, sarana, dan utilitas umum	476.050.600	953.979.500	802.477.100	602.222.700	434.949.232	460.927.230	932.312.100	793.591.850	451.566.125	411.237.350	97	98	99	75	94	53	42

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Disperkimtan, 2025



## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang ditemukan pada periode Rentsra sebelumnya secara garis besar yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman</li> <li>2. Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan</li> <li>3. Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</li> <li>4. Lemahnya akses masyarakat terhadap sumber daya kunci perumahan</li> <li>5. Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan</li> <li>6. Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan</li> </ol>
		b. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman</li> <li>2. Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman</li> <li>3. Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana Kawasan</li> <li>4. Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman</li> </ol>
		c. Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni/peningkatan Kualitas RTLH</li> <li>2. Pembangunan Baru Rumah Layak Huni bagi backlog</li> </ol>
		d. Meningkatkan Kualitas hunian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi mengenai pengembangan perumahan</li> <li>2. Sosialisasi mengenai standar rumah layak huni</li> <li>3. Sosialisasi mengenai standar pemenuhan PSU Perumahan</li> <li>4. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan permukiman Kumuh</li> </ol>

		e. Mengurangi resiko dampak bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan lahan relokasi terdampak bencana</li> <li>2. Pengumpulan data korban terdampak bencana</li> <li>3. Sosialisasi prosedur dan tahapan rehabilitasi terdampak bencana</li> </ol>
		f. Masih belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan anggaran dan sumber daya</li> <li>2. Perencanaan yang tidak tepat sasaran serta kurang komprehensif. Tata kelola dan pemanfaatan infrastruktur yang belum optimal.</li> </ol>
		g. Masih belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalah kebijakan dan regulasi.</li> <li>2. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan perumahan. Kebijakan serta peraturan mengenai administrasi dan perizinan yang kompleks.</li> </ol>
2	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	a. Penyediaan Jaringan Listrik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk penyediaan listrik.</li> <li>2. Perencanaan kebutuhan listrik yang tidak tepat sasaran akibat faktor eksternal.</li> <li>3. Kerusakan infrastruktur listrik akibat gangguan teknis maupun faktor internal lainnya</li> </ol>
		b. Penyediaan Lampu Jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sumber daya manusia untuk pemeliharaan, pengawasan, dan penyediaan.</li> <li>2. Keterbatasan anggaran dan material listrik.</li> <li>3. Kurangnya pemahaman mengenai spesifikasi teknis kelistrikan.</li> </ol>
3	Penyediaan tanah untuk menunjang program pemerintah	a. Pengadaan tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan regulasi mengenai penggunaan tanah yang tidak jelas.</li> <li>2. Proses negosiasi yang rumit karena melibatkan banyak pihak.</li> <li>3. Potensi penyalahgunaan wewenang. Praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat.</li> </ol>

		<b>b.Redistribusi tanah</b>	1. Data Pertanahan yang tidak akurat 2. Ketimpangan struktur penguasaan tanah 3. Lemahnya Kepastian dan perlindungan Hukum
--	--	-----------------------------	--

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Disperkimtan, 2025

**Tabel 2.2.2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS PERMASALAHAN YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Geografis dan Konektivitas Laut	Infrastruktur yang Belum Merata	Infrastruktur Dasar, Konektivitas dan Literasi Digital	Cuaca Ekstrem, Perubahan Kritis terhadap Ekosistem, Biodiversity dan Gangguan Ekosistem, Krisis SDA dan Polarisasi Sosial	Transformasi Ekonomi, Isu Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Terbatasnya kapasitas dan kualitas infrastruktur konektivitas antarwilayah	Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah

Sumber : Dokumen RPJMD Kab Kaur Tahun 2025-2029

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut:

—Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkunganl.

### 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut:

<b>Visi</b>	:	<b><i>MENUJU KABUPATEN KAUR YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BAHAGIA</i></b>
<b>Misi 2</b>	:	<i>“Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.”</i>

### **3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renstra**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil rumusan dari permasalahan dan isu-isu strategis bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang akan di tindak lanjuti penanganannya.

a. Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025 Adalah Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan Dan Terciptanya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

b. Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025 Adalah:

- Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
- Meningkatnya Penyediaan dan Peyeleaian Permasalahan Pertanahan
- Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.

**Tabel 3.3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>											
- Meningkatkan jumlah rumah layak huni - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dan terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	57,67	20	60,71	60,92	61,91	62,71	62,71	
		Meningkatnya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	51	51,45	60	65	70	75	80	
		Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	0	1	2	3	4	5	
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	0	12,5	10	12	13	14	15	
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0,32	0,36	0,54	0,81	1,21	1,82	2,73	
			Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	65	20	3,5	3,7	3,8	4	4	
		Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	75	75,5	76	76,5	77	77,5	78	
		Meningkatnya Penyediaan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Jumlah bidang tanah yang didistribusi (Bidang Tanah)	30	35	40	45	50	60	60	
			Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria (Kepala Keluarga)	310	35	150	200	250	300	350	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	65	70-73	73-75	75-77	75-78	78-79	78-80	

### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran teknis dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya, berfungsi sebagai panduan utama dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan.

Arah kebijakan ini dirumuskan dengan merujuk pada operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini dipastikan selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Lebih lanjut, arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kaur ini mencerminkan respons terhadap isu-isu strategis sektor perumahan di tingkat global, nasional, regional, dan lokal. Adapun Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dapat dirumuskan pada tabel 3.4.1 di bawah ini :

**Tabel 3.4.1 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan Renstra**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak Huni	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak Huni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan rumah menjadi layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan</li> <li>2. Peningkatan akses masyarakat terhadap akses pembiayaan perumahan</li> <li>3. Pengurangan kawasan kumuh</li> <li>4. Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas</li> <li>5. Peningkatan Penyelesaian Sengketa tanah garapan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni</li> <li>2. Penanganan rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan</li> <li>3. Fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan program pembangunan</li> <li>4. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan</li> <li>5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perumahan</li> </ol>

Sumber : Dokumen RENSTRA Diperkimtan Prov Bengkulu (2025-2029)

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.**

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Bengkulu untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang dapat melaksanakan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik, upaya pelebagaan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman tersebut perlu dilakukan terhadap seluruh unsur pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat yang berkepentingan dibidang perumahan dan permukiman, baik berada ditingkat nasional, regional maupun lokal.

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan menengah OPD.

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

##### **1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :**

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rensra PD Dan Renja PD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

## II. Program Pengembangan Perumahan

1. Kegiatan Pendataan penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
- Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun Dan Rumah Khusus

2. Kegiatan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
  - Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan
3. Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
  - Operasional Dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Pada Relokasi Program Kabupaten/Kota

### III. Program Kawasan Permukiman

1. Kegiatan Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Ha)
  - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Ha) dengan sub kegiatan sebagai berikut:
  - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
  - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

### IV. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - Penyediaan PSU Di Perumahan

### V. Program Penyelesaian sengketa tanah garapan

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

### VI. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

VII. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

1. Kegiatan Penetapan Subjek Dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dengan Sub Kegiatan Sebagai berikut :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## 4.2 Indikator Kinerja Daerah

Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR		BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)		(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>1.04.2.10.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>										
<b>I</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65	70-73	73-75	75-77	75-78	78-79	70-80	
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	1	2	3	4	5	
3	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
4	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	Persentase	0,32	0,36	0,54	0,81	1,21	1,82	2,73	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	75	75,5	76	76,5	77	77,5	78	
6	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase	75	75,5	76	76,5	77	77,5	78	
7	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persentase	51	51,45	51,90	51,55	51,60	52	53	
<b>II</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	%	57,67	20	60,71	60,92	61,91	62,71	62,71	
2	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	30	35	40	45	50	60	60	
3	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	310	35	150	200	250	300	350	
4	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	65	20	3,5	3,7	3,8	4	4	
5	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	51	51,45	60	65	70	75	80	
6	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persentase	0	12,5	10	12	13	14	15	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampun (Substansi)	0			1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1			1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	
1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.500.000,00		5.600.000,00		5.700.000,00		5.800.000,00		5.900.000,00			
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		5.500.000,00	1	5.600.000,00	1	5.700.000,00	1	5.800.000,00	1	5.900.000,00			
1.04.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				9.000.000,00		9.100.000,00		9.200.000,00		9.300.000,00		9.400.000,00			
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	9.000.000,00	1	9.100.000,00	1	9.200.000,00	1	9.300.000,00	1	9.400.000,00			
1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				11.000.000,00		11.100.000,00		11.200.000,00		11.300.000,00		11.400.000,00			
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	11.000.000,00	1	11.100.000,00	1	11.200.000,00	1	11.300.000,00	1	11.400.000,00			
1.04.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00			
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2		12.000.000,00	2	13.000.000,00	2	14.000.000,00	2	15.000.000,00	2	16.000.000,00			
1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16.000.000,00		16.800.000,00		17.325.000,00		18.191.000,00		19.000.000,00			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	16.000.000,00	1	16.800.000,00	1	17.325.000,00	1	18.191.000,00	1	19.000.000,00			
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0		100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				8.440.000,00		8.862.000,00		9.305.100,00		9.770.000,00		10.260.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1	8.440.000,00	1	8.862.000,00	1	9.305.100,00	1	9.770.000,00	1	10.260.000,00		
1.04.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	0	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	0	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.680.408.786,00		2.814.709.225,00		2.955.724.686,00		3.103.790.920,00		3.259.260.466,00		
Dokumen-dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19	31	2.680.408.786,00	31	2.814.709.225,00	31	2.955.724.686,00	31	3.103.790.920,00	31	3.259.260.466,00		











BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				394.450.000,00		414.172.500,00		434.881.125,00		456.625.180,00		479.456.438,00		
Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	394.450.000,00	1	414.172.500,00	1	434.881.125,00	1	456.625.180,00	1	479.456.438,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1			1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1			1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		11		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				175.000.000,00		183.750.000,00		192.937.500,00		202.584.375,00		212.713.593,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	175.000.000,00	1	183.750.000,00	1	192.937.500,00	1	202.584.375,00	1	212.713.593,00		
1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				54.000.000,00		56.750.000,00		59.637.500,00		62.669.375,00		65.852.843,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	54.000.000,00	1	56.750.000,00	1	59.637.500,00	1	62.669.375,00	1	65.852.843,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				27.200.000,00		28.560.000,00		29.988.000,00		31.487.400,00		33.061.770,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	27.200.000,00	1	28.560.000,00	1	29.988.000,00	1	31.487.400,00	1	33.061.770,00		
1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				8.500.000,00		8.925.000,00		9.371.250,00		9.839.812,00		10.331.803,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	8.500.000,00	1	8.925.000,00	1	9.371.250,00	11	9.839.812,00	1	10.331.803,00		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				128.750.000,00		135.187.500,00		141.946.875,00		149.044.218,00		156.496.429,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		128.750.000,00	1	135.187.500,00	1	141.946.875,00	1	149.044.218,00	1	156.496.429,00		
1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0		1.000.000,00	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			0		0		1		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		0			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	50.000,00	0	50.000,00	1	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00		
1.04.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00	1	50.000,00	0	50.000,00		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				139.195.200,00		140.295.200,00		141.395.200,00		142.495.200,00		143.595.200,00		
Persentase jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	139.195.200,00	0	140.295.200,00	1	141.395.200,00	0	142.495.200,00	0	143.595.200,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0			1		1		1		1			
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0		1.000.000,00	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				121.195.200,00		122.195.200,00		123.195.200,00		124.195.200,00		125.195.200,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	121.195.200,00	1	122.195.200,00	1	123.195.200,00	1	124.195.200,00	1	125.195.200,00		
1.04.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				16.000.000,00		16.100.000,00		16.200.000,00		16.300.000,00		16.400.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		16.000.000,00	1	16.100.000,00	1	16.200.000,00	1	16.300.000,00	1	16.400.000,00		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				317.406.014,00		259.761.075,00		194.668.889,00		121.127.700,00		39.127.896,00		
Persentase jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	317.406.014,00	2	259.761.075,00	2	194.668.889,00	2	121.127.700,00	2	39.127.896,00		
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		1		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0			0		1		0		0			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0			0		0		0		0			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2			2		2		2		2			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		1		0			
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0			0		0		1		0			
1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				34.000.000,00		35.000.000,00		36.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		34.000.000,00	2	35.000.000,00	2	36.000.000,00	2	37.000.000,00	2	38.000.000,00		
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	1	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00		
1.04.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0		100.000,00	1	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00		
1.04.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	100.000,00	0	100.000,00	1	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00		
1.04.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	1	100.000,00	0	100.000,00		
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	1	100.000,00	0	100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	1	100.000,00	0	100.000,00		
1.04.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	1	100.000,00	0	100.000,00		
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		100.000,00	0	100.000,00	1	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00		
1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				282.406.014,00		223.761.075,00		157.668.889,00		83.127.700,00		127.896,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		282.406.014,00	2	223.761.075,00	2	157.668.889,00	2	83.127.700,00	2	127.896,00		
1.04.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	1	100.000,00	0	100.000,00		
1.04.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	0	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00	1	100.000,00	0	100.000,00		
1.04.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Peningkatan mutu pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0		1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	1.000.000,00		
1.04.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0		1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	0	1.000.000,00		
1.04.01.2.13 - Penataan Organisasi				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Telaksananya penataan organisasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	0	1		1		1		1		1				
1.04.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00			
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	0	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00			
1.04.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00			
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	0	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00			
1.04.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00			
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	0		200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00			
1.04.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00			
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	0		200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00			
1.04.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00			
1.04.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00			
Dokumen Terulis, laporan, dan komunikasi yang dipublikasikan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	0	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	0			1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	0			1		1		1		1				
1.04.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan				300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00			
Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	0		300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00			
1.04.01.2.14.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00			
Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00			
1.04.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00			
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	0	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00			
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				100.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	0		100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	0	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0		100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0		300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00		
1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				47.500.000,00		48.000.000,00		48.500.000,00		49.000.000,00		49.500.000,00		
Adanya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	47.500.000,00	20	48.000.000,00	20	48.500.000,00	20	49.000.000,00	20	49.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	0	0		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	0			20		20		20		20				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	0			20		20		20		20				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	50	50		55		60		65		70				
	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)	0	0		20		20		20		20				
1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00			
Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	0		500.000,00	20	500.000,00	20	500.000,00	20	500.000,00	20	500.000,00			
1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00			
Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	0	0	100.000,00	10	100.000,00	10	100.000,00	10	100.000,00	10	100.000,00			
1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00			
Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	0		100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00			
1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00			
Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	100.000,00	20	100.000,00	20	100.000,00	20	100.000,00	20	100.000,00			
1.04.02.2.02.0008 - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00			
Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	100.000,00	20	100.000,00	20	100.000,00	20	100.000,00	20	100.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	0		100.000,00	20	100.000,00	20	100.000,00	20	100.000,00	20	100.000,00		
1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				46.500.000,00		47.000.000,00		47.500.000,00		48.000.000,00		48.500.000,00		
Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	50		46.500.000,00	55	47.000.000,00	60	47.500.000,00	65	48.000.000,00	70	48.500.000,00		
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				48.500.000,00		63.000.000,00		77.500.000,00		87.000.000,00		96.500.000,00		
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	5		48.500.000,00	5	63.000.000,00	5	77.500.000,00	5	87.000.000,00	5	96.500.000,00		
	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	5			5		5		5		5			
	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0			1		1		1		1			
	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	0		0		10		10		10			
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0			10		10		10		10			
	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	0	0		10		10		10		10			
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				11.000.000,00		11.500.000,00		12.000.000,00		12.500.000,00		13.000.000,00		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	5	5	11.000.000,00	5	11.500.000,00	5	12.000.000,00	5	12.500.000,00	5	13.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	0	0	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00		
1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota				30.500.000,00		44.500.000,00		58.500.000,00		67.500.000,00		76.500.000,00		
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	5	5	30.500.000,00	5	44.500.000,00	5	58.500.000,00	5	67.500.000,00	5	76.500.000,00		
1.04.02.2.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	0	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00		
1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0		1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00		
1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00		
1.04.02.2.03.0010 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan di lingkungan perumahan bagi korban bencana	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	0		1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00		
1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	0	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya pendistribusian dan serah terima rumah bencana	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0			10		10		10		10			
	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	0		10		10		10		10			
1.04.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0		250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00		
1.04.02.2.04.0004 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00		
1.04.02.2.04.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00		
1.04.02.2.04.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	0	250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00	10	250.000,00		
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Lavak Huni	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	0	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	0			10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	0			1		1		1		1			
	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
1.04.02.2.05.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Laporan)	0		250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00		
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	0	0	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00		
1.04.02.2.05.0003 - Pembangunan Rumah Khusus				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		
Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)	0	0	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00		
1.04.02.2.05.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah (Dokumen)	0		100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.02.2.05.0007 - Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Rumah)	0	0	100.000,00	10	100.000,00	10	100.000,00	10	100.000,00	10	100.000,00		
1.04.02.2.05.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	0	0	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	0		500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0			1		1		1		1			
	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara (Sistem Informasi)	0			1		1		1		1			
1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	0	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	0		100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Laporan)	0	0	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00		
1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				100.000,00		100.000,00				100.000,00				
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	0		100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.03.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum				100.000,00		100.000,00				100.000,00				
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum (Laporan)	0		100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				89.000.000,00		84.000.000,00		79.750.000,00		79.000.000,00		76.500.000,00		
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	0	0	89.000.000,00	20	84.000.000,00	20	79.750.000,00	20	79.000.000,00	20	76.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Perumahan Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	0			10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)	0	0		10		10		10		10			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	0		1.000.000,00	20	1.000.000,00	20	1.000.000,00	20	1.000.000,00	20	1.000.000,00		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				210.000.000,00		230.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		290.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	0	0	210.000.000,00	1	230.000.000,00	1	250.000.000,00	1	270.000.000,00	1	290.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	0			10		10		10		10			
	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	15	10		10		10		10		10			
	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar)	0	0		3		3		3		3			
	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali (Ha)	0	0		3		3		3		3			
	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	0			5		5		5		5			
	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	0			1		1		1		1			
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				191.000.000,00		201.000.000,00		211.000.000,00		221.000.000,00		231.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	15	10	191.000.000,00	10	201.000.000,00	10	211.000.000,00	10	221.000.000,00	10	231.000.000,00		
1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	0	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Hektar)	0	0	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase pencegahan kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru (Persentase)	2,32	2,62	100.000.000,00	3,17	200.000.000,00	3,22	300.000.000,00	3,50	400.000.000,00	4,17	500.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pencegahan tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga)	0		100.000.000,00	10	200.000.000,00	10	300.000.000,00	10	400.000.000,00	10	500.000.000,00		
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	15	11		12		13		14		15			
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	0	0		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan)	0			1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Orang)	0	0		20		20		20		20			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	0	0		20		20		20		20			
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	0	0		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				94.000.000,00		194.000.000,00		294.000.000,00		394.000.000,00		494.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	15	11	94.000.000,00	12	194.000.000,00	13	294.000.000,00	14	394.000.000,00	15	494.000.000,00		
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	0		1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00		
1.04.04.2.01.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	0	0	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00		
1.04.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Rumah Tangga)	0		1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00	10	1.000.000,00		
1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan)	0	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	0	0	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00		
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1		200.000.000,00	1	225.000.000,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.04.05.2.01.0006 - Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		
Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU (Kelompok)	0		200.000,00	3	200.000,00	3	200.000,00	3	200.000,00	3	200.000,00		
1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0		200.000,00	2	200.000,00	2	200.000,00	2	200.000,00	2	200.000,00		
1.04.05.2.01.0009 - Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan (Dokumen)	0	0	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00		
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	0	0	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00		
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0		100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00	2	100.000,00		
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				299.000.000,00		299.000.000,00		299.000.000,00		299.000.000,00		299.000.000,00		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0		299.000.000,00	2	299.000.000,00	2	299.000.000,00	2	299.000.000,00	2	299.000.000,00		
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				100.000.000,00		115.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				98.000.000,00		198.000.000,00		298.000.000,00		398.000.000,00		498.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		98.000.000,00	1	198.000.000,00	1	298.000.000,00	1	398.000.000,00	1	498.000.000,00		
2.10.05.2.01.0003 - Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah (Laporan)	0		1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.10.05.2.01.0004 - Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		1.800.000.000,00		
Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan (Laporan)	0		1.700.000.000,00	1	1.700.000.000,00	1	1.700.000.000,00	1	1.700.000.000,00	1	1.800.000.000,00		
2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		
Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan)	0	1	3.200.000.000,00	1	3.200.000.000,00	1	3.200.000.000,00	1	3.200.000.000,00	1	3.200.000.000,00		
2.10.05.2.01.0007 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0		1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	0	0,1	100.000.000,00	0,2	200.000.000,00	0,3	300.000.000,00	0,4	400.000.000,00	0,5	500.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.00 00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	50		52		52,12		52,37		53,57			





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
2.10.06.2.02.0003 - Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				96.000.000,00		196.000.000,00		296.000.000,00		396.000.000,00		496.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dokumen)	0	1	96.000.000,00	1	196.000.000,00	1	296.000.000,00	1	396.000.000,00	1	496.000.000,00			
2.10.06.2.02.0004 - Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Dokumen)	0		1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00			
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	0	0,1	100.000.000,00	0,2	200.000.000,00	0,3	300.000.000,00	0,4	400.000.000,00	0,5	500.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Persentase)	51	51,90		51,55		51,60		52		53				
	Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata (Persentase)	0			70		100		100		100				
2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00			
Terpenuhinya penetapan tanah ulayat	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0		100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota (Dokumen)	0	0		1		1		1		1				
2.10.07.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				99.000.000,00		199.000.000,00		299.000.000,00		399.000.000,00		499.000.000,00			
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	99.000.000,00	1	199.000.000,00	1	299.000.000,00	1	399.000.000,00	1	499.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.07.2.01.0003 - Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Ditetapkannya Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan oleh Bupati/Walikota	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota (Dokumen)	0		1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	25	45	100.000.000,00	55	200.000.000,00	57	300.000.000,00	59	400.000.000,00	60	500.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
2.10.08.2.01 - Penyelesaian Masalah Tanah Kosong				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terpenuhinya penyelesaian masalah tanah kosong	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong (Laporan)	0		1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.10.08.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong (Laporan)	0		1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				99.000.000,00		199.000.000,00		299.000.000,00		399.000.000,00		499.000.000,00		
Terpenuhinya inventarisasi pemanfaatan tanah kosong	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara)	0	0	99.000.000,00	1	199.000.000,00	1	299.000.000,00	1	399.000.000,00	1	499.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan)	0			1		1		1					
2.10.08.2.02.0001 - Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Laporan)	0		1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.10.08.2.02.0002 - Pemanfaatan Tanah Kosong				97.000.000,00		197.000.000,00		297.000.000,00		397.000.000,00		497.000.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen)	0	1	97.000.000,00	1	197.000.000,00	1	297.000.000,00	1	397.000.000,00	1	497.000.000,00		
2.10.08.2.02.0003 - Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi pemanfaatan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfaatan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara)	0	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penggunaan tanah yang teratur, legal, dan berkelanjutan				100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
2.10.09.2.01 - Penerbitan Izin Membuka Tanah				100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Terpenuhinya penertiban izin membuka tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00		
2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah				100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00		
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	0		50.000.000,00	15	60.000.000,00	15	70.000.000,00	15	80.000.000,00	15	90.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Meningkatnya penggunaan tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK (Dokumen)	0	0	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul (Dokumen)	0	0		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0			1		1		1					
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0			1		1		1					
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Dokumen)	0	0		1		1		1					
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0		1		1		1					
2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0		1.000.000,00	1		1.000.000,00	1		1.000.000,00	1		1.000.000,00		
2.10.10.2.01.0002 - Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Dokumen)	0	0	1.000.000,00	1		1.000.000,00	1		1.000.000,00	1		1.000.000,00		
2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota				45.000.000,00			55.000.000,00			65.000.000,00			75.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	45.000.000,00	1		55.000.000,00	1		65.000.000,00	1		75.000.000,00		
2.10.10.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		
Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		1.000.000,00	1		1.000.000,00	1		1.000.000,00	1		1.000.000,00		
2.10.10.2.01.0005 - Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul				1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul (Dokumen)	0	0	1.000.000,00	1		1.000.000,00	1		1.000.000,00	1		1.000.000,00		
2.10.10.2.01.0006 - Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK				1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		
Terlaksananya inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK dan analisis dalam rangka pembentukan lembaga dan pengaturan kelembagaan yang terkait dengan jenis usaha pelaku usaha sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil pada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK (Dokumen)	0		1.000.000,00	1		1.000.000,00	1		1.000.000,00	1		1.000.000,00		

## 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

**Tabel 4.4.1 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>				
1.	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.04.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.04.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.04.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.04.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu 1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Mili k Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
3.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
4.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
5.	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
6.	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.05.2.01.0004 - Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
7.	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSITANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	

## 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

Tabel 4.5.1 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.04.2.10.000.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									
2.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	1	2	3	4	5	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65	70-73	73-75	75-77	75-78	78-79	78-80	
4.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	%	57,67	20	60,71	60,92	61,91	62,71	62,71	
5.	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
6.	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	0,32	0,36	0,54	0,81	1,21	1,82	2,73	
7.	Jumlah bidang tanah yang didistribusikan	Bidang Tanah	30	35	40	45	50	60	60	
8.	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	310	35	150	200	250	300	350	
9.	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	65	20	3,5	3,7	3,8	4	4	
10.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	51	51,45	60	65	70	75	80	
11.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	75	75,5	76	76,5	77	77,5	78	
12.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persentase	0	12,5	10	12	13	14	15	

## 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD

Tabel 4.6.1 Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
2.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	positif	%	57,67	20	60,71	60,92	61,91	62,71	62,71	
3.	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	positif	%	65	20	3,5	3,7	3,8	4	4	
4.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	positif	Indeks	51	35	60	65	70	75	75	
5.	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	positif	Persentase	0	12,5	10	12	13	14	15	
6.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
7.	Jumlah bidang tanah yang didistribusikan	positif	Bidang Tanah	30	35	40	45	50	60	60	
8.	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	positif	Kepala Keluarga	310	35	150	200	250	300	350	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan masing-masing Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029, dan sekaligus menjadi manifestasi komitmen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih: —Menuju Kabupaten Kaur yang Maju, Sejahtera, dan Bahagia! Sebagai instrumen perencanaan, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan disusun tidak hanya untuk memenuhi kewajiban normatif, tetapi juga sebagai peta jalan yang menuntun organisasi menuju peningkatan kinerja kelembagaan, kualitas layanan publik, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam era tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan berbasis hasil (*result-oriented governance*), keberadaan Renstra menjadi semakin penting dalam memastikan sinergi antar program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, keterpaduan pembangunan lintas sektor, serta penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sangat bergantung pada sejumlah faktor kunci, antara lain:

- Kesiapan dan adaptabilitas kelembagaan, termasuk keselarasan struktur organisasi dan prosedur kerja dengan dinamika kebutuhan pembangunan;
- Kapabilitas sumber daya manusia, baik dalam aspek teknis, manajerial, maupun integritas pelayanan;
- Ketepatan sasaran program dan kegiatan, yang berbasis data, kebutuhan masyarakat, dan hasil evaluasi kebijakan sebelumnya;
- Ketersediaan anggaran dan efisiensi pendayagunaannya, serta Komitmen kolektif seluruh unsur pimpinan dan pelaksana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dalam melaksanakan Renstra secara konsisten dan berkelanjutan.

Untuk menjamin akurasi pelaksanaan dan kesesuaian dengan dinamika pembangunan, pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan akan dikawal melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi tahunan. Evaluasi ini

dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, pencapaian indikator kinerja, serta untuk merespons perubahan strategis baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Apabila terdapat kondisi yang mendesak atau perubahan kebijakan yang signifikan, maka substansi Renstra, termasuk indikator kinerja, dapat disesuaikan melalui prosedur revisi yang ditetapkan, tanpa mengubah arah dan tujuan utama organisasi.

Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh bidang, seksi, atau unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan agar mampu merancang dan melaksanakan rencana kerja tahunan (Renja) secara lebih terarah, terukur, dan sinergis. Setiap unit diharapkan berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, baik melalui kegiatan pelayanan, fasilitasi, pengawasan, pengembangan kapasitas, maupun pemberdayaan masyarakat dan stakeholder lainnya.

Lebih dari itu, Renstra ini juga bertujuan untuk membangun semangat kolektif dan budaya kerja kolaboratif di antara seluruh perangkat daerah. Melalui pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah, seluruh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan diharapkan dapat saling mendukung dan memperkuat—meninggalkan cara kerja sektoral yang terpisah, dan bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang integratif dan responsif. Sebagai penutup, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi, memperkuat sinergi antar program pembangunan, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat perubahan dan komitmen bersama, mari kita wujudkan Kabupaten Kaur yang semakin maju, merata pembangunannya, sejahtera masyarakatnya, dan bahagia dalam harmoni sosial dan budaya.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN KAUR**



**Ismawar Hasdan, ST., M.Si.**

Pembina TK.I, IV/b

NIP. 19790816 200312 1 005